



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERUBAHAN DOKUMEN HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI
HUKUM BAWASLU PROVINSI**

2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
JL. MH. THAMRIN No.14 JAKARTA PUSAT**

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Nomor SOP	17/HK.06/SJ/08/2022
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2022
	Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL  Dr. GUNAWAN SUSWANTORO NIP. 19660630 199303 1 001
	Nama SOP	SOP Perubahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.		Memahami Prosedur Pengelolaan JDIIH Bawaslu Provinsi
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengunggahan Dokumen Hukum JDIIH Bawaslu Provinsi 2. SOP <i>Take Down</i> Dokumen Hukum JDIIH Bawaslu Provinsi 3. SOP Penghapusan Dokumen Hukum JDIIH Bawaslu Provinsi		1. Laman JDIIH Bawaslu
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka akan terjadi pengelolaan JDIIH Bawaslu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		1. Nota Dinas 2. Dokumen Hukum 3. Form Penyimpanan Fisik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERUBAHAN DOKUMEN HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Kepala Sekretariat	Kepala Bagian yang membidangi Hukum	Operator JDIH	Pusat JDIH Bawaslu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengajukan permohonan perubahan dokumen hukum yang akan di ubah pada laman JDIH Bawaslu						Dokumen hukum	2 hari kerja	Nota Dinas Permohonan Perubahan dokumen Hukum ke laman JDIH Bawaslu	Pemohon antara lain: Bagian pada Bawaslu Provinsi. Permohonan dapat diajukan melalui media elektronik (misalnya melalui aplikasi whatsapp, email, dan/atau media elektronik lainnya)
2	Menerima permohonan perubahan dokumen hukum						Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
3	Menerima disposisi permohonan perubahan dokumen hukum						Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
4	Melakukan pemeriksaan permohonan perubahan dokumen hukum, jika: a. sudah sesuai, memberikan disposisi b. belum sesuai, permohonan perubahan dokumen hukum dikembalikan						Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
5	Menerima disposisi permohonan perubahan dokumen hukum						Dokumen hukum	1 hari kerja	Disposisi	
6	Melakukan perubahan dokumen hukum pada laman JDIH Bawaslu						Dokumen hukum	1 hari kerja	Dokumen hukum terubah	
7	Memberikan tanda sudah diubah pada dokumen hukum tersebut dan melakukan pembaruan dokumen hukum pada penyimpanan fisik						Form Pengisian Penyimpanan Fisik Dokumen Hukum, Dokumen Hukum	1 hari kerja	Pembaruan dokumen hukum	
8	Melaporkan bahwa dokumen hukum sudah dilakukan perubahan						Dokumen hukum	1 hari kerja	Laporan	
9	Melakukan verifikasi terhadap dokumen hukum yang dilakukan perubahan						Dokumen hukum	1 hari kerja	Dokumen hukum terverifikasi	
10	Melaporkan bahwa dokumen hukum pemohon sudah terubah pada laman JDIH Bawaslu						Dokumen hukum	1 hari kerja	Laporan	
11	Menerima laporan bahwa dokumen hukum pemohon sudah terubah pada laman JDIH Bawaslu						Dokumen hukum	1 hari kerja	Laporan	
12	Menerima laporan bahwa terdapat dokumen hukum yang dirubah pada laman JDIH Bawaslu						Dokumen hukum	1 hari kerja	Laporan	